

## **RECONSTRUCTION OF PHYSICAL DEVELOPMENT CONSTRUCTION SERVICES LEGAL TO BASED PUBLIC SERVICE QUALITY**

### **ABSTRACT**

The purpose of this study was to analyze the implementation for physical construction has been running optimally; factor-factors that lead to the need for reconstruction of the law on the implementation of physical construction services to based the quality of public services; as well as the execution of construction services law reconstruction of physical development to improve the quality of public services can be applied fairly.

This study uses a juridical normative and juridical empirical approach. Technique of data analysis of primary data, researchers used a type of data analysis techniques Strauss and J. Corbin, by analyzing the data since researchers were in the field (*field*). Once the data is validated, the researchers conducted reconstruction and qualitative inductive analysis to be able to answer the problem.

The results of this study are (1) Implementation of the physical construction can not run optimally. An imbalance between the limited construction work or the project and the service provider results in bargaining power of the service provider. With the large number of service providers, the service users are free to make choices. Their concerns are not getting jobs which are tendered service users menyebabkan project owner or service provider willing to accept the construction contract made by the service user. That when the tendering process service providers usually reluctant to ask things sensitif but important as the availability of funds, the contents of the contract, ease of payment, service providers are afraid it blacklisted; (2) Factor-factors that lead to the need for reconstruction of the law on the implementation of physical construction services to improve the quality of public services, such as inefficiency, monopolies and practices-practices of corruption, collusion, and nepotism in construction activities, the lack of availability of opportunities or equitable opportunities for people to take part in the organization of work construction services, competition Unhealthy between the service providers, and the lack of compliance with regulations legislation; and (3) the reconstruction of the law against the laws relating to construction should be carried out reconstruction on Articles 3 and 88 of Law No. 2 of 2017 on Construction Services so that both the article reads: (a) Article 3 letter f reads creating integration the added value of all phases of the implementation of the Construction services of physical development that can improve the quality of public services based on values of justice; and (b) of Article 88 paragraph (6) reads In the case of mediation by forming the board of the dispute referred to in paragraph (5), election of board membership dispute is conducted based on the principles of professionalism and not be part of one of the parties, as well as in solving construction employment contract disputes do not disrupt public services.

**Keywords:** Reconstruction of Laws, Construction Services, Physical Development, Public Service

# **REKONSTRUKSI HUKUM JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN FISIK YANG BERBASIS MUTU PELAYANAN PUBLIK**

## **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan konstruksi pembangunan fisik sudah berjalan secara optimal; faktor-faktor yang menyebabkan perlu adanya rekonstruksi hukum terhadap pelaksanaan jasa konstruksi pembangunan fisik yang berbasis mutu pelayanan publik; serta rekonstruksi hukum jasa konstruksi pelaksanaan pembangunan fisik yang berbasis mutu pelayanan publik dapat diterapkan secara adil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Teknik analisis data terhadap data primer, peneliti menggunakan teknis analisis data tipe Strauss dan J. Corbin, yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan (*field*). Setelah data divalidasi, peneliti melakukan rekonstruksi dan analisis secara induktif kualitatif untuk menjawab permasalahan.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pelaksanaan konstruksi pembangunan fisik belum dapat berjalan secara optimal. Ketidakseimbangan antara terbatasnya pekerjaan konstruksi atau proyek dan penyedia jasa mengakibatkan posisi tawar penyedia jasa sangat lemah. Dengan banyaknya jumlah penyedia jasa maka pengguna jasa leluasa melakukan pilihan. Adanya kekhawatiran tidak mendapatkan pekerjaan yang ditenderkan pengguna jasa atau pemilik proyek menyebabkan penyedia jasa rela menerima kontrak konstruksi yang dibuat oleh pengguna jasa. Bahwa sewaktu proses tender biasanya penyedia jasa enggan bertanya hal-hal yang sensitif namun penting seperti ketersediaan dana, isi kontrak, kelancaran pembayaran, penyedia jasa takut pihaknya dimasukkan dalam daftar hitam; (2) Faktor-faktor yang menyebabkan perlu adanya rekonstruksi hukum terhadap pelaksanaan jasa konstruksi pembangunan fisik yang berbasis mutupelayanan publik, antara lain adanya inefisiensi, monopoli, dan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kegiatan jasa konstruksi, kurangnya tersedianya kesempatan atau peluang yang adil bagi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, adanya persaingan yang tidak sehat antar para penyedia jasa, dan kurangnya kepatuhan akan peraturan perundang-undangan; serta (3) rekonstruksi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa konstruksi hendaknya dilakukan rekonstruksi terhadap Pasal 3 dan 88 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sehingga kedua pasal tersebut berbunyi: (a) Pasal 3 huruf f berbunyi menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi pembangunan fisik yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik berbasis nilai keadilan; serta (b) Pasal 88 ayat (6) berbunyi Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak, serta dalam upaya penyelesaian sengketa kontrak kerja kontruksi tidak mengganggu jalannya pelayanan publik.

Kata Kunci: Rekonstruksi Hukum, Jasa Konstruksi, Pembangunan Fisik, Pelayanan Publik